

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12 tentang Laporan Operasional (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri)” ini ditulis oleh Ermiya Novi Jannatunaim, dibawah bimbingan Eni susilowati, M.Pd.

Kata Kunci: PSAP Nomor 12, Laporan Operasional, Akuntansi Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penerapan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional oleh entitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12 tentang Laporan Operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. PSAP Nomor 12 merupakan standar akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Operasional dalam lingkungan pemerintahan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Fokus masalah penelitian ini adalah Pertama, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana dinas menyusun laporan operasional. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penyusunan laporan operasional yang digunakan telah memenuhi persyaratan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12 atau tidak. Ketiga, penelitian ini akan mencari tahu apakah dinas mungkin menghadapi kesulitan dalam proses penyusunan laporan operasional sesuai PSAP Nomor 12. Keempat, penelitian ini juga akan melihat bagaimana Solusi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari kendala-kendala yang telah terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAP Nomor 12 dalam penyusunan Laporan Operasional di instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, Dinas melaksanakan proses penyusunan Laporan Operasional menggunakan sistem yaitu SIPD oleh pengelola keuangan dan juga melakukan rekonsiliasi Bersama bidang akuntansi BPKAD, Kedua, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri telah menerapkan sebagian besar prinsip yang diatur dalam PSAP Nomor 12. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Laporan Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu kurangnya pemahaman pengelola keuangan terhadap proses pencatatan dan seringnya terjadi error pada sistem SIPD. Keempat, Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu pengelola keuangan belajar lagi dan juga lebih memahami lagi terkait bidang akuntansi dan juga pencatatan dalam Laporan Operasional.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan instansi pemerintah dapat lebih memahami pentingnya penerapan standar akuntansi yang baik dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan transparan.

ABSTRACT

The thesis entitled "Analysis of the Implementation of Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 12 concerning Operational Reports (Case Study at the Housing and Settlement Agency of Kediri Regency)" was written by Ermiya Novi Jannatunaim, under the guidance of Eni Susilowati, M.Pd

Keywords: PSAP Number 12, Operational Reports, Government Accounting, Transparency, Accountability

This research is motivated by the importance of implementing PSAP Number 12 concerning Operational Reports by government entities. This study aims to analyze the implementation of Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 12 concerning Operational Reports at the Housing and Settlement Agency of Kediri Regency. PSAP Number 12 is an accounting standard that regulates the preparation and presentation of Operational Reports in the government environment in order to increase financial transparency and accountability.

The focus of this research problem is First, this study wants to know how the agency prepares operational reports. Second, this study aims to evaluate whether the preparation of operational reports used has met the requirements of Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 12 or not. Third, this study will find out whether the agency may face difficulties in the process of preparing operational reports according to PSAP Number 12. Fourth, this study will also see how the Solutions carried out by the Housing and Settlement Agency from the obstacles that have occurred.

This study uses a qualitative method with a Case Study approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation which were then analyzed in depth to evaluate the suitability of the implementation of PSAP Number 12 in the preparation of Operational Reports in related agencies. The results of the study indicate that first, the Service carries out the process of preparing Operational Reports using a system, namely SIPD by financial managers and also carries out reconciliation with the BPKAD accounting sector, Second, the Housing and Settlement Service of Kediri Regency has implemented most of the principles regulated in PSAP Number 12. Third, the obstacles faced in the process of preparing Operational Reports of the Housing and Settlement Service are the lack of understanding of financial managers regarding the recording process and frequent errors in the SIPD system. Fourth, the solution taken by the Housing and Settlement Service is that financial managers learn again and also understand more about accounting and recording in Operational Reports.

With this study, it is hoped that government agencies can better understand the importance of implementing good accounting standards in improving the quality of financial reports and supporting more accurate and transparent decision making.